

**DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

SHINTA RIANA ANGGRAINI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA**

Oleh

SHINTA RIANA ANGGRAINI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI

pada

**Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Oleh
SHINTA RIANA ANGGRAINI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, infrastruktur jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan data panel kuantitatif dan model Lin-Log, dengan analisis panel dinamis menggunakan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM). Transformasi logaritma pada variabel investasi dan infrastruktur jalan dilakukan untuk mengatasi bias distribusi data dan memperbaiki linearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, sebagian besar variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, investasi, infrastruktur jalan, PAD, TPAK, dan IPM menunjukkan pengaruh yang signifikan. PAD terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus berfokus pada strategi jangka panjang, terutama dalam penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Implikasi kebijakan dari penelitian ini mendorong perlunya penyusunan roadmap investasi berbasis klaster industri, prioritas pembangunan infrastruktur jalan, optimalisasi PAD melalui kebijakan fiskal lokal, penguatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan insentif migrasi tenaga kerja terampil, serta peningkatan kualitas IPM melalui layanan dasar dan pembangunan SDM. Pendekatan jangka panjang menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, investasi, Infrastruktur Jalan, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, GMM.*

ABSTRACT

DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN REGENCIES/CITIES IN INDONESIA

By
SHINTA RIANA ANGGRAINI

This study aims to analyze the influence of investment, road infrastructure, Local Own-Source Revenue (PAD), Labor Force Participation Rate (LFPR), and the Human Development Index (HDI) on economic growth in 14 regencies/cities in Indonesia during the period 2020–2023. The study employs quantitative panel data using a Lin-Log model, with a dynamic panel analysis approach through the Generalized Method of Moments (GMM). Logarithmic transformation was applied to the investment and road infrastructure variables to correct data distribution bias and improve linearity. The findings reveal that in the short term, most independent variables do not have a significant effect on economic growth. However, in the long term, investment, road infrastructure, PAD, LFPR, and HDI show significant influence. PAD has a positive and significant effect in both the short and long term. These results indicate that regional economic development planning should prioritize long-term strategies, particularly in strengthening investment, infrastructure development, and human capital improvement. The policy implications highlight the importance of developing cluster-based investment roadmaps, prioritizing road infrastructure, optimizing PAD through local fiscal policy, enhancing labor skills via training and skilled labor migration incentives, and improving HDI through basic services and human resource development. A long-term approach is essential to achieve inclusive and sustainable regional economic growth.

Keywords : *Economic Growth, Investment, Road Infrastructure, Local Own-Source Revenue, Labor Force Participation Rate, Human Development Index, GMM*

Judul Tesis : **DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Shinta Riana Anggraini**

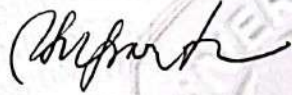
Nomor Pokok Mahasiswa : **2221021020**

Program Studi : **Magister Ilmu Ekonomi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. I Wayan Suparta S.E., M.Si.
NIP. 19611209 198803 1 003



Dr. Asih Murwiati, S.E., M.Si.
NIP. 19740410 200812 2 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Asih Murwiati, S.E., M.Si.
NIP. 19740410 200812 2 001

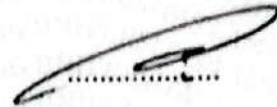
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

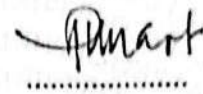
Ketua : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.



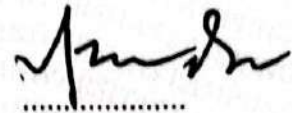
Sekretaris : Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.



Penguji I : Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.



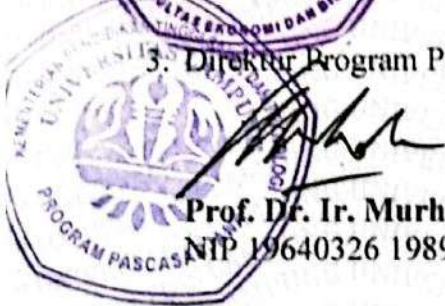
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Naitopi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 28 Juli 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2025

Penulis,



Shinta Riana Anggraini

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Terbanggi Besar, pada tanggal 18 Agustus 1993 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Taufiek, S.H. dan Ibu Yuliana Artika AR (almh.)

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD 02 Yayasan Pendidikan Indolampung, Bandar Lampung pada tahun 2005. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Satya Dharma Sudjana Gunung Madu Plantations Lampung Tengah pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah selesai pada tahun 2010, dilanjutkan pendidikan S1 di Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan selesai pada bulan Mei tahun 2014.

Pada bulan Oktober 2014 penulis mulai bekerja sebagai Mikro Kredit Analis di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga saat ini.

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Pada 18 Oktober 2023, penulis mengikuti Program *Field Study* ke Malaysia yang diadakan oleh Magister Ilmu Ekonomi selama 4 hari. Perjalanan ini menjadi perjalanan pertama yang mengesankan penulis ke luar negeri. Universitas yang kami kunjungi adalah *International Islamic University Malaysia (IIUM)* dan *Limkokwing University*.

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 94:6)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Bertanggungjawablah atas pilihanmu”

(Shinta Riana Anggraini)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw. Kupersembahkan karya yang cukup sederhana ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk :

Ayahku Taufiek, S.H., dan bundaku Yuliana Artika AR (almh.) orang tua yang begitu luar biasa yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta selalu memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Suamiku Arie Veridansyah Putra, S.H., serta anak-anakku tercinta Ghinan Zeeshan Verdian dan Ghaniyya Saadah Verdian yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan di dalam kehidupan penulis.

Adik-adikku Shendy Sukma Yulta, S.H. dan Shailla Lubna Pradyta yang selalu mendoakan dan membuatku tersenyum bahagia.

Para dosen Magister Ilmu Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan doa dalam mengerjakan tesis ini.

Tak Lupa Almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, Penulis masih bisa merasakan segala nikmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia”**.

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Master Ekonomi, pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta motivasi dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang begitu sabar dan luar biasa dalam memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang begitu sabar dan selalu mendukung dalam memberikan kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.

7. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran perbaikan dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung yang telah banyak mencurahkan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S2.
9. Para admin prodi di Magister Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan tesis, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Taufiek, S.H., dan Bunda Yuliana Artika AR (almh.) serta Adik-adikku tersayang Shendy Sukma Yulta S.H., dan Shailla Lubna Pradyta yang begitu luar biasa dan selalu memberikan doa, serta dukungan demi kesuksesan penulis.
11. Suamiku Arie Verdiansyah Putra S.H., serta anak-anakku tercinta Ghinan Zeeshan Verdian dan Ghaniyya Saadah Verdian yang selalu mendukung dan menjadi semangat penulis.
12. Teman seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2022, Mba Teti, Titis, Endah, Syifa, Amat, Arif, Mba Aang, Royif, Andro, Erma, Mba Fischa, Wulan, Kak Rulio, Julian, Mas Hadi, dan Irfan yang selalu mendukung penulis untuk berjuang. Selain itu, teman-teman di Angkatan 2023 yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Bandar Lampung yang telah memberikan dukungan untuk penulis khususnya Rekan Kerja Tim Unit Bisnis Mikro Branch Tanjung Karang Kartini, Bu Revi, Pak Ridwan, Andriyansyah, Tania, Nando, Riki, dan Ayu.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 28 Juli 2025
Penulis,

Shinta Riana Anggraini

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori.....	22
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik	22
2.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen.....	23
2.1.3 Investasi.....	24
2.1.4 Infrastruktur Jalan	28
2.1.5 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	30
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	31
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia.....	33
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
III. METODE PENELITIAN	42
3.1 Ruang Lingkup.....	42
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data	43
3.3 Definisi dan Operasional Variabel	44
3.4 Metode Analisis	46
3.4.1 Pengujian Estimasi Model.....	47

3.4.2	Penentuan Model Estimasi Terbaik	49
3.3.4	Uji Signifikansi	51
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.2	Hasil Penelitian Menggunakan FD-GMM (<i>First-Difference Generalized Method of Moments</i>)	54
4.2.1	Uji Validitas FD-GMM.....	55
4.2.2	Uji Konsistensi FD-GMM	56
4.2.3	Uji Ketidakbiasan FD-GMM	57
4.3	Hasil Penelitian Menggunakan SYS-GMM.....	58
4.3.1	Uji Validitas SYS-GMM	58
4.3.2	Uji Konsistensi SYS-GMM	58
4.3.3	Uji Ketidakbiasan SYS-GMM	59
4.3.4	Hasil Estimasi SYS-GMM (Pengaruh Jangka Pendek)	60
4.4	Pembahasan.....	61
4.4.1	Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia	61
4.4.2	Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia	64
4.4.3	Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia	66
4.4.4	Pengaruh TPAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia	68
4.4.5	Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia	71
V.	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	74
5.1.	Kesimpulan	74
5.2	Implikasi Kebijakan	75
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN PENELITIAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia.....	3
Tabel 2. Daftar Nama-nama Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia	5
Tabel 3. Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota di Indonesia	7
Tabel 4. Panjang Jalan di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023	10
Tabel 5. PAD di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023	13
Tabel 6. Persentase TPAK di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023...	15
Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023	18
Tabel 8. Penelitian Terdahulu	35
Tabel 9. Data Objek Penelitian	42
Tabel 10. Deskripsi Data.....	43
Tabel 11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 12. Hasil FDGMM	55
Tabel 13. Hasil Uji Sargan FDGMM.....	56
Tabel 14. Hasil Uji Konsistensi FDGMM	57
Tabel 15. Hasil Uji Ketidakbiasan FD-GMM.....	57
Tabel 16. Hasil Uji Sargan SYS-GMM	58
Tabel 17. Hasil Uji Konsistensi SYS-GMM.....	59
Tabel 18. Hasil Uji Ketidakbiasan SYS-GMM	59

Tabel 19. Hasil Uji Estimasi SYSGMM dalam Jangka Pendek	60
Tabel 20. Hasil Pengaruh Jangka Panjang LIJ terhadap PE	65
Tabel 21. Hasil Pengaruh Jangka Panjang LINV terhadap PE	62
Tabel 22. Hasil Pengaruh Jangka Panjang PAD terhadap PE.....	68
Tabel 23. Hasil Pengaruh Jangka Panjang TPAK terhadap PE	69
Tabel 24. Hasil Pengaruh Jangka Panjang IPM terhadap PE.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia merupakan tujuan utama dari pemerintah dan merupakan harapan dari segenap Masyarakat Indonesia. Proses pembangunan di Indonesia melibatkan berbagai tahapan dan komponen yang dirancang untuk memajukan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pembangunan di Indonesia ini sesuai dengan program dan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program global yang diinisiasi oleh PBB guna mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan di Tingkat global. SDG's mulai diterapkan sejak tahun 2015 yang merupakan bagian dari agenda 2030, menggantikan dan melanjutkan komitmen Tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 (Nawir dan Sinjai, 2022).

Penerapan SDGs di Indonesia merupakan bagian dari upaya nasional untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Indonesia telah mengadopsi dan mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan nasional. Terdapat 17 tujuan utama SDGs yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah pengembangan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi merupakan program yang akan diusahakan dan diterapkan khususnya di Indonesia.

Salah satu tujuan penerapan SDGs di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. SDGs membantu Indonesia

dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak merusak lingkungan (Sampurna, 2022).

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi menjadi salah satu indikator dari keberhasilan negara dalam mengelola sumber dayanya, baik SDM (Sumber Daya Manusia) maupun SDA (Sumber Daya Alam). Menurut Solow (1956) pertumbuhan ekonomi menekankan pada aktivitas dan kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern dalam menghasilkan output. Teorinya mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Pemanfaatan sumber daya yang produktif ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang ingin mewujudkan reformasi ekonomi (Azzahra et al., 2022). Reformasi ekonomi merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dengan menargetkan instrumen kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi perubahan perilaku agen ekonomi publik maupun swasta dengan harapan untuk meningkatkan permintaan berkelanjutan dan non-inflasi terhadap ekonomi nasional atau meningkatkan investasi produktifnya sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan target penciptaan lapangan kerja (Bakoup, 2013).

Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pencapaian reformasi ekonomi lebih cepat adalah dengan dibentuknya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). KEK merupakan kebijakan strategis Pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. KEK juga merupakan kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang *ultimate* dihadirkan bagi investor dalam dan luar negeri (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2022).

Dalam mendorong percepatan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah wilayah sebagai Kawasan ekonomi khusus dalam laporan KEK Tahun 2022 yaitu Arun Lhokseumawe, Kabupaten Sei Mangkei, Kabupaten Nongsa, Kabupaten Batam

Aero Technic, Kabupaten Galang Batang, Kabupaten Tanjung Kelayang, Kabupaten Tanjung Lesung, Kabupaten Lido, Kabupaten Kendal, Kabupaten Gresik, Kabupaten Singhasari, Kabupaten Mandalika, Kabupaten Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kabupaten Palu, Kabupaten Likupang, Kabupaten Bitung, Kabupaten Morotai, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sanur.

Tujuan utama pembangunan wilayah kabupaten/kota yang terpilih menjadi Kawasan ekonomi khusus di Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional (Afriyana et al., 2023). Melalui wilayah-wilayah tersebut, Indonesia berupaya memperkuat ekonomi daerah dengan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal melalui pengembangan wilayah-wilayah yang memiliki potensi tetapi kurang berkembang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah-wilayah yang terpilih menjadi tujuan utama dalam meningkatkan ekonomi regional di Indonesia.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia

No	Kab./Kota	KEK	2020	2021	2022	2023
1	Kota Lhokseumawe	Arun Lhokseumawe	-1,80	3,84	4,01	4,21
2	Kab. Simalungun	Sei Mangkei	1,01	3,70	4,68	5,07
3	Kota Batam	Nongsa dan Batam Aero Technic	-2.55	4.75	6.84	7.04
4	Kab. Bintan	Galang Batang	-4.28	0.23	4.44	6.14
5	Kab. Belitung	Tanjung Kelayang	-2.27	5.62	5.71	5.75
6	Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung	-1.32	3.10	3.47	2.53
7	Kab. Bogor	Lido	-1.19	3.55	5.25	5.19
8	Kab. Kendal	Kendal	-2.43	3.89	5.68	5.56
9	Kab. Gresik	Gresik	1.21	3.79	7.38	4.62
10	Kab. Malang	Singhasari	-2.45	4.21	6.32	6.07

11	Kab. Lombok Tengah	Mandalika	-6.67	4.03	3.55	5.77
12	Kab. Kutai Timur	Maloy Batuta Trans Kalimantan	-3.08	-0.89	5.58	7.71
13	Kota Palu	Palu	-4.43	5.97	4.32	4.96
14	Kab. Minahasa Utara	Likupang	-0.90	5.36	5.50	5.41
15	Kota Bitung	Bitung	1.37	4.60	5.61	5.66
16	Kab. Pulau Morotai	Morotai	2.01	2.04	3.10	2.48
17	Kab. Sorong	Sorong	-2.50	1.62	2.12	3.27
18	Kota Denpasar	Sanur	-9.44	-0.92	5.02	5.69

Sumber : Bapan Pusat Statistik (2024)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota pada tabel di atas menunjukkan adanya dinamika yang menarik untuk diteliti dan analisa lebih dalam. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan setelah adanya dampak dari pembatasan aktivitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan *lockdown* yang berdampak pada konsumsi, produksi, dan distribusi pada barang maupun jasa menjadi terganggu. Namun, tidak semua kabupaten/kota mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini tergambarkan pada Tabel 1 disebutkan bahwa pada Kota Denpasar pada dua tahun berturut-turut mengalami kontraksi yaitu di tahun 2020 dan 2021 seiring masih melemahnya prospek pariwisata global akibat masih berlakunya *travel restriction*, akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 5.69 persen karena adanya perbaikan kinerja pada lapangan usaha terkait pariwisata, transportasi, perdagangan, dan lapangan usaha penyedia akomodasi, makanan dan minuman (Bank Indonesia, 2023).

Namun, tidak semua wilayah menunjukkan pola serupa. Kabupaten Pulau Morotai pada Tabel 1. menunjukkan bahwa meskipun mengalami perbaikan pada tahun 2021, justru mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 2.48 persen pada 2023. Hal ini mengindikasikan adanya kendala struktural atau implementasi kebijakan yang tidak optimal, meskipun dengan dibentuknya wilayah yang dijadikan kawasan ekonomi khusus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya diversifikasi sektor ekonomi di daerah tersebut, terutama Kabupaten Pulau Morotai masih bergantung pada sektor

pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan perubahan tren wisata. Selain itu, promosi investasi maupun sinergi dengan masyarakat lokal merupakan faktor lain yang memengaruhi adanya keterbatasan aksesibilitas dan mengurangi daya tarik suatu wilayah tersebut untuk dijadikan tempat berinvestasi bagi investor. Selain itu, adanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai karena kurangnya sumber daya manusia terlatih maupun terdidik yang mampu mengolah sumber daya lokal yang ada secara optimal (Hasnin, 2018).

Kawasan ekonomi khusus di Indonesia sampai dengan tahun 2023 terdapat Sembilan belas wilayah, dimana 19 wilayah tersebut mempunyai kegiatan utama yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan keunggulannya masing-masing. Tabel berikut ini merupakan hasil rangkuman dari 18 kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Kawasan ekonomi khusus, yang dimana terdapat dua kabupaten pada Kota Batam dijadikan satu dalam penggambarannya dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Daftar Nama-nama Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Tahun Bediri	Kegiatan Utama
1	Arun Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	2018	Industri
2	Sei Mangkei	Kab. Simalungun	2013	Industri dan Pariwisata
3	Nongsa dan Batam Aero Technic	Kota Batam	2022	Pariwisata dan Riset Ekonomi Digital, Logistik
4	Galang Batang	Kab. Bintan	2018	Industri dan Logistik
5	Tanjung Kelayang	Kab. Belitung	2017	Pariwisata
6	Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	2013	Pariwisata
7	Lido	Kab. Bogor	2022	Pariwisata dan Industri
8	Kendal	Kab. Kendal	2020	Industri
9	Gresik	Kab. Gresik	2022	Industri dan Logistik

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Tahun Bediri	Kegiatan Utama
10	Singhasari	Kab. Malang	2020	Pariwisata dan Teknologi
11	Mandalika	Kab. Lombok Tengah	2015	Pariwisata
12	Maloy Batuta Trans Kalimantan	Kab. Kutai Timur	2015	Industri dan Logistik
13	Palu	Kota Palu	2015	Industri dan Logistik
14	Likupang	Kab. Minahasa Utara	2020	Pariwisata
15	Bitung	Kota Bitung	2014	Industri dan Logistik
16	Morotai	Kab. Pulau Morotai	2015	Industri dan Pariwisata
17	Sorong	Kab. Sorong	2017	Industri dan Logistik
18	Sanur	Denpasar	2023	Kesehatan

Sumber: Laporan KEK Indonesia (2022)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa 18 KEK tersebut berada di wilayah yang berbeda-beda dan memiliki kegiatan utama yang berbeda juga. Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 40 Tahun 2021 lokasi atau wilayah yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, mempunyai batas yang jelas, dan lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan. Pembentukan KEK ini sendiri mempunyai tujuan utama yaitu membuka investasi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Investasi yang masuk akan meningkatkan serapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Investasi pada wilayah-wilayah yang terpilih menjadi kawasan ekonomi khusus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Hal ini tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten/Kota di Indonesia

No	Kab/Kota	KEK	2020	2021	2022	2023
1	Kota Lhokseumawe	Arun Lhokseumawe	2,223	8,838	5,549	10,810
2	Kab. Simalungun	Sei Mangkei	29,538	17,589	39,883	35,796
3	Kota Batam	Nongsa dan Batam Aero Technic	76,730	45,104	56,016	91,489
4	Kab. Bintan	Galang Batang	74,154	147,363	118,750	194,766
5	Kab. Belitung	Tanjung Kelayang	6,919	6,389	18,528	10,350
6	Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung	267,945	273,746	426,335	556,448
7	Kab. Bogor	Lido	206,427	217,816	177,545	193,248
8	Kab. Kendal	Kendal	67,792	77,807	38,961	41,884
9	Kab. Gresik	Gresik	29,631	19,251	35,010	41,093
10	Kab. Malang	Singhasari	35,089	22,797	41,459	48,662
11	Kab. Lombok Tengah	Mandalika	25,155	27,072	30,208	24,417
12	Kab. Kutai Timur	Maloy Batuta Trans Kalimantan	58,750	86,100	37,803	74,519
13	Kota Palu	Palu	51,725	138,849	136,845	209,085
14	Kab. Minahasa Utara	Likupang	24,654	18,373	12,974	14,090
15	Kota Bitung	Bitung	19,723	14,698	10,379	11,272
16	Kab. Pulau Morotai	Morotai	36,279	100,852	240,901	281,994
17	Kab. Sorong	Sorong	22,066	3,554	814	2,500
18	Kota Denpasar	Sanur	32,584	50,219	49,948	89,832

Sumber: Laporan KEK (2022)

Data pada Tabel 3 merupakan data realisasi investasi yang dilakukan para investor domestik yang biasanya lebih peka terhadap kondisi lokal dan memiliki pemahaman lebih baik tentang pasar domestik. maupun oleh investor asing yang memiliki kepercayaan terhadap potensi wilayah tersebut serta kontribusi dalam bentuk teknologi, inovasi, dan akses pasar global di kabupaten/kota pada wilayah

yang termasuk di dalam kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Sehingga dapat saling melengkapi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan efek *multiplier* di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Nilai investasi terbesar berada pada Kabupaten Pandeglang yang terdapat KEK Tanjung Lesung dan mempunyai total investasi dari tahun 2020 sampai dengan 1.524.474 ribu USD. KEK Tanjung Lesung terletak berdekatan dengan Taman Nasional Ujung Kulon, yang merupakan kawasan konservasi penting dengan biodiversitas yang kaya akan sumber daya alam. Fokus utama dari KEK Tanjung Lesung adalah pengembangan pariwisata dan industri terkait, seperti hotel, resort, dan fasilitas rekreasi (Kusumawati dan Purmiyati, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Wirathi (2023) dan Suryade et al., (2022) investasi merupakan salah satu variabel utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing lokasi Kawasan ekonomi khusus tempat penelitiannya. Pengaruhnya dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor industri. Investasi pada wilayah tersebut sering kali melibatkan pembangunan proyek besar seperti pabrik, *resort*, atau pusat bisnis, yang menciptakan lapangan kerja langsung. Investasi juga memicu penciptaan lapangan kerja tidak langsung melalui rantai pasokan, layanan pendukung, dan sektor terkait lainnya. Investasi di wilayah yang termasuk ke dalam kawasan ekonomi khusus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja lebih banyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, mendorong diversifikasi industri, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu et al., (2021). Penelitiannya menemukan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di salah satu kota di China. Investasi umumnya diharapkan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, namun dalam beberapa kondisi tertentu, investasi bisa saja tidak memberikan dampak yang signifikan atau bahkan berdampak negatif seperti yang ditemukan oleh penelitiannya. Beberapa hal ditemukan bahwa keterbatasan infrastruktur dapat menghambat produktivitas dan

menurunkan efektivitas investasi, mengurangi potensi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu investasi yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi pada infrastruktur. Pembangunan investasi infrastruktur dapat menjadi dasar utama dalam suatu program investasi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur ini melibatkan pihak swasta maupun masyarakat agar semua elemen disekitarnya dapat merasakan manfaat yang berkelanjutan. Menurut Paksi (2020) kebijakan pembangunan infrastruktur harus diupayakan untuk tidak hanya fokus pada peningkatan nilai output, namun juga pada pemerataan pendistribusiannya.

Infrastruktur merupakan salah satu dasar fundamental dalam proses pembangunan. Pembangunan keberlanjutan akan dapat tercapai jika banyak dukungan dari beberapa komponen salah satunya ketersediaan sarana dan prasarana dalam infrastruktur. Hal ini akan berdampak positif bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat ditandai dengan peningkatan kesejahteraan, pemerataan pendapatan, serta kebutuhan masyarakat terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan ekonomi khusus, pada pasal 29 disebutkan bahwa daerah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus diberikan waktu tiga tahun untuk beroperasi dan pembangunan. Proses pembangunan di dalamnya terkait dengan pembebasan lahan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Pelaksanaan pembangunan fisik meliputi pembangunan barang-barang modal serta sarana dan prasarana penunjang (infrastruktur).

Pentingnya infrastruktur mempunyai tujuan untuk menunjang segala macam aktivitas khususnya kegiatan ekonomi. Infrastruktur juga digunakan sebagai trigger untuk meningkatkan investasi dalam dan luar negeri (Andrianto et al., 2024). Menurut Tarigan (2019) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut Mankiw (2013) tenaga kerja akan lebih produktif jika mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal yang sama dijelaskan Todaro dan Smith (2013) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara atau wilayah merupakan faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Infrastruktur jalan mempengaruhi pergerakan perekonomian masyarakat karena jalan merupakan jalur distribusi dan salah satu pemicu kelancaran transaksi perekonomian di suatu daerah. Hal ini mencerminkan bahwa jalan menjadi pemicu terjadinya perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Infrastruktur jalan akan mempermudah mobilitas barang dan orang dari suatu daerah kedaerah lain untuk seluruh kegiatan khususnya aktivitas ekonomi. Maka jika terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan maka akan menghambat atau terjadinya kemacetan dalam proses pengiriman dan berdampak pada penurunan ekonomi. Penyediaan jalan sangatlah penting sebagai jalur perekonomian untuk menunjang kegiatan di dalamnya. Berikut ini merupakan panjang jalan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Tabel 4. Panjang Jalan di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023

No	Kab/Kota	Lokasi	2020	2021	2022	2023
1	Kota Lhokseumawe	Arun Lhokseumawe	412.5	412.5	415.1	418.3
2	Kab. Simalungun	Sei Mangkei	219.8	219.8	219.8	220.5
3	Kota Batam	Nongsa dan Batam Aero Technic	978.3	999.5	999.5	1.003,5
4	Kab. Bintan	Galang Batang	622.3	622.31	622.31	622.31
5	Kab. Belitung	Tanjung Kelayang	1,036.4	1,036.4	1,073.7	1,073.7
6	Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung	206.03	208.16	208.16	208.16
7	Kab. Bogor	Lido	1707.38	1707.38	1748.92	1748.92
8	Kab. Kendal	Kendal	770.34	770.34	770.36	782.71
9	Kab. Gresik	Gresik	21.34	21.34	21.34	24.56
10	Kab. Malang	Singhasari	1668.76	1668.76	1668.76	1668.76

No	Kab/Kota	Lokasi	2020	2021	2022	2023
11	Kab. Lombok Tengah	Mandalika	941.09	941.09	941.09	941.09
12	Kab. Kutai Timur	Maloy Batuta Trans Kalimantan	502.1	505.43	505.43	505.43
13	Kota Palu	Palu	851.88	851.88	901.32	911.46
14	Kab. Minahasa Utara	Likupang	400	400	400	400
15	Kota Bitung	Bitung	535.15	535.15	535.15	554.7
16	Kab. Pulau Morotai	Morotai	181.56	192.34	192.34	192.34
17	Kab. Sorong	Sorong	323.3	323.3	323.3	323.3
18	Kota Denpasar	Sanur	542.71	542.71	542.71	542.71

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Tabel 4 merupakan data panjang jalan Kabupaten/Kota di Indonesia. Menurut Brueckner (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa zona ekonomi khusus di negara berkembang seperti Argentina, Brazil, Colombia, India, dan Philippines mempunyai Panjang jalan yang setiap tahunnya meningkat walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini menandakan adanya perkembangan daerah untuk mendukung adanya wilayah yang telah berstatus menjadi zona ekonomi khusus sebagai wilayah khusus untuk mendatangkan investasi luar maupun dalam negeri. Tabel 4 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa daerah yang mempunyai panjang jalan stagnan dari tahun ke tahun. Kabupaten Galang Batang, Singhasari, Mandalika, Likupang, Sorong, dan Sanur merupakan contoh daerah yang mempunyai panjang jalan sama dari tahun ke tahun. Panjang jalan tersebut merupakan akumulasi dari panjang jalan dengan kondisi baik, tidak baik, dan jalan tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Qureshi dan Farooq (2020) dan Tarigan (2019) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara peningkatan panjang jalan terhadap perekonomian di suatu wilayah. Apabila prasarana jalan terus dilakukan perbaikan dan peningkatan secara kuantitas, maka jalan akan menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam perekonomian nasional dan juga peningkatan daya saing ekonomi nasional terhadap

perekonomian dunia internasional. Peran pemerintah untuk meningkatkan aktivitas perkonomian dalam direalisasikan dengan peningkatan distribusi dengan adanya perbaikan dan penambahan akses jalan. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Zhang dan Cheng (2023) yang menemukan bahwa panjang jalan tidak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di UK (United Kingdom). Penelitiannya menemukan bahwa perbaikan kondisi jalan yang akan memperbaiki sisi distribusi barang dan jasa sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah sehingga dapat berkontribusi terhadap PDB.

Konversi suatu kabupaten/kota yang dijadikan zona ekonomi khusus dalam suatu negara diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai mekanisme ekonomi. Wilayah tersebut akan menerima berbagai insentif, seperti kemudahan perizinan, pembebasan pajak tertentu, serta investasi infrastruktur yang masif. Hal ini mampu menarik investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya, sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Pertambahan volume investasi dan aktivitas bisnis, pemerintah daerah mendapatkan pajak dan retribusi dari berbagai sektor, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, serta pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.

Selain dari sisi pajak, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal pada akhirnya akan meningkatkan daya beli dan konsumsi domestik. Peningkatan konsumsi ini dapat menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh ini juga memberikan kontribusi langsung kepada PAD melalui retribusi pasar dan pendapatan dari aset daerah yang dimanfaatkan. Melalui strategi pengelolaan yang baik, tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah, sehingga mampu memperkuat kemandirian finansial pemerintah setempat (Hadisantoso et al., 2023). Berikut ini merupakan tabel yang berisikan data PAD kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 5. PAD di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023

No	Kab/Kota	KEK	2020	2021	2022	2023
1	Kota Lhokseumawe	Arun Lhokseumawe	80.66	93.65	67.99	77.28
2	Kab. Simalungun	Sei Mangkei	71.21	72.72	79.13	65.46
3	Kota Batam	Nongsa dan Batam Aero Technic	69.35	77.53	80.03	81.23
4	Kab. Bintan	Galang Batang	76.29	78.99	88.61	101.87
5	Kab. Belitung	Tanjung Kelayang	87.12	78.66	79.21	81.28
6	Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung	85.91	86.38	84.23	77.31
7	Kab. Bogor	Lido	114.00	117	120	120
8	Kab. Kendal	Kendal	76.32	77.81	81.92	82.22
9	Kab. Gresik	Gresik	103.77	97.21	98.04	76.41
10	Kab. Malang	Singhasari	68.21	73.48	77.63	81.81
11	Kab. Lombok Tengah	Mandalika	61.81	63.24	66.03	74.64
12	Kab. Kutai Timur	Maloy Batuta Trans Kalimantan	76.21	78.23	111.81	44.76
13	Kota Palu	Palu	97.05	123.57	87.02	73.21
14	Kab. Minahasa Utara	Likupang	87.88	91.21	98.31	100.21
15	Kota Bitung	Bitung	83.39	86.56	92.11	99.51
16	Kab. Pulau Morotai	Morotai	72.74	82.50	85.61	88.91
17	Kab. Sorong	Sorong	76.91	77.52	65.44	46.68
18	Kota Denpasar	Sanur	87.71	91.01	96.55	117.81

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Data pada Tabel 5 di atas memperlihatkan PAD dari berbagai kabupaten/kota periode 2020-2023 yang diproksikan dari persentase realisasi PAD. Persentase ini menunjukkan sejauh mana realisasi PAD yang tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika persentase realisasi lebih dari seratus persen, berarti pendapatan yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan. Sebaliknya, jika persentase realisasi kurang dari seratus persen, berarti target tidak tercapai. Beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor (Lido) dan Kota Denpasar (Sanur) mencatat tren peningkatan PAD yang konsisten. PAD Kabupaten Bogor misalnya, terus meningkat dari 114% pada 2020 menjadi 120% pada 2023, sedangkan Kota Denpasar menunjukkan lonjakan dari 87,71% pada 2020 menjadi 117,81% pada

2023. Hal ini mengindikasikan efektivitas pengelolaan di wilayah tersebut dalam menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada penerimaan daerah.

Namun, tidak semua Kabupaten/kota wilayah menunjukkan hasil positif. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sorong mengalami penurunan signifikan dalam PAD pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PAD Kabupaten Gresik menurun drastis dari 103,77 pada 2020 menjadi hanya 76,41 pada 2023, sementara Kabupaten Sorong anjlok dari 76,91 pada 2020 menjadi 46,68 pada 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya optimalisasi atau eksternal seperti perubahan ekonomi global. Perbedaan tren ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan suatu wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah untuk memastikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Nasir (2023) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. PAD dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika dikelola secara efisien dan diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif. Dana dari PAD dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, atau kawasan industri, yang memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu, PAD dapat dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, bantuan modal untuk UMKM, dan penyediaan fasilitas publik yang berkualitas. Hal ini mencerminkan bahwa investasi yang bersumber dari PAD tidak hanya meningkatkan daya saing daerah tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Efek ganda dari peningkatan aktivitas ekonomi lokal, seperti meningkatnya konsumsi, lapangan kerja, dan investasi, akan memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan. Peningkatan investasi yang terjadi pada KEK dapat juga meningkatkan lapangan pekerjaan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk usia kerja dalam suatu wilayah tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur seberapa besar potensi tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di suatu daerah (BPS, 2023).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berperan penting di Indonesia karena mencerminkan sejauh mana penduduk lokal terlibat dalam aktivitas ekonomi di wilayah yang termasuk zona ekonomi khusus. Dimana wilayah tersebut dirancang untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga TPAK yang tinggi menjadi indikator keberhasilan strategi ini. Partisipasi aktif tenaga kerja lokal memungkinkan transfer keterampilan dan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi angka pengangguran. Selain itu, keterlibatan tenaga kerja membantu mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung, seperti transportasi, logistik, dan jasa. Peningkatan TPAK tidak hanya memperkuat keberlanjutan wilayah tersebut. Tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal secara menyeluruh. Tabel di bawah ini merupakan data dari TPAK di Kabupaten/Kota di Indonesia.

Tabel 6. Persentase TPAK di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023

No	Kab/Kota	KEK	2020	2021	2022	2023
1	Kota Lhokseumawe	Arun Lhokseumawe	69.93	72.12	77.31	80.26
2	Kab. Simalungun	Sei Mangkei	68.21	69.33	71.34	73.87
3	Kota Batam	Nongsa dan Batam Aero Technic	85.43	86.09	83.51	69.63
4	Kab. Bintan	Galang Batang	62.31	63.21	66.03	67.55
5	Kab. Belitung	Tanjung Kelayang	68.74	69.39	67.43	68.98
6	Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung	55.43	57.91	60.33	66.92
7	Kab. Bogor	Lido	61.21	62.55	63.75	64.22
8	Kab. Kendal	Kendal	67.71	69.22	73.54	76.93
9	Kab. Gresik	Gresik	61.39	63.45	68.31	70.12
10	Kab. Malang	Singhasari	68.21	69.33	70.38	70.66

	Kab. Lombok		68.72	72.45	75.87	76.87
11	Tengah	Mandalika				
	Kab. Kutai	Maloy Batuta Trans	66.71	67.97	67.78	64.97
12	Timur	Kalimantan				
13	Kota Palu	Palu	69.28	70.50	72.32	71.82
	Kab. Minahasa		71.61	72.34	74.51	77.61
14	Utara	Likupang				
15	Kota Bitung	Bitung	60.21	61.88	64.54	78.34
	Kab. Pulau		66.48	63.54	67.71	70.12
16	Morotai	Morotai				
17	Kab. Sorong	Sorong	65.63	67.13	68.23	69.29
18	Kota Denpasar	Sanur	67.32	68.67	69.71	71.02

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Tabel di atas menunjukkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2020-2023. Secara umum, sebagian besar daerah menunjukkan tren peningkatan TPAK, yang mencerminkan bertambahnya keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Contohnya, Kota Lhokseumawe (Arun Lhokseumawe) mencatat peningkatan signifikan dari 69,93 pada 2020 menjadi 80,26 pada 2023, serta Kabupaten Kendal (Kendal) yang meningkat dari 67,71 pada 2020 menjadi 76,93 pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya efek positif dalam menciptakan lapangan kerja dan menarik lebih banyak penduduk usia kerja untuk aktif secara ekonomi.

Namun tidak semua wilayah menunjukkan peningkatan TPAK yang konsisten. Misalnya, Kota Batam (Nongsa dan Batam Aero Technic) mengalami penurunan signifikan dari 85,43 pada 2020 menjadi 69,63 pada 2023, yang mungkin disebabkan oleh tekanan ekonomi atau kurang optimalnya pengelolaan kawasan. Selain itu, beberapa daerah, seperti Kabupaten Kutai Timur (Maloy Batuta Trans Kalimantan), menunjukkan fluktuasi TPAK, dengan penurunan dari 66,71 pada 2020 menjadi 64,97 pada 2023. Variasi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal dan keberlanjutan ekonomi untuk menjaga TPAK tetap tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al., (2023) dan Nadhilla (2023) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara TPAK dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas produktif. Ketika TPAK meningkat, lebih banyak tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik melalui sektor formal maupun informal, sehingga mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Hal ini secara langsung meningkatkan output ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari tingginya TPAK juga berkontribusi pada peningkatan daya beli, yang pada gilirannya mendorong konsumsi domestik sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, TPAK yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Koversi wilayah konvensional menjadi wilayah zona ekonomi khusus selain bertujuan untuk membentuk perekonomian yang berkelanjutan, juga untuk membentuk SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi lebih berkualitas.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu wilayah dapat direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena IPM mencakup tiga dimensi utama yang menentukan potensi dan produktivitas individu. Dimensi kesehatan, yang diukur melalui harapan hidup, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan produktif. Dimensi pendidikan, yang meliputi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, menunjukkan akses dan kualitas pendidikan yang menjadi fondasi kemampuan intelektual dan keterampilan tenaga kerja. Sementara itu, dimensi standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran per kapita, mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui IPM yang tinggi, kualitas SDM dianggap baik karena masyarakat memiliki tingkat kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan daya beli yang cukup, sehingga SDM tersebut mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial (Nasyri et al., 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi katalis dalam meningkatkan dimensi-dimensi yang diukur yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM yang tinggi juga menjadi daya tarik bagi investor, karena mencerminkan kualitas SDM yang mampu mendukung produktivitas dan keberlanjutan kawasan.

Hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi bersifat saling memperkuat, di mana peningkatan kualitas SDM melalui IPM dapat mendorong keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berikut ini merupakan data IPM di kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2023

No	Kab/Kota	KEK	2020	2021	2022	2023
1	Kota Lhokseumawe	Arun Lhokseumawe	77.31	77.57	78.04	78.92
2	Kab. Simalungun	Sei Mangkei	73.25	73.41	73.77	74.29
3	Kota Batam	Nongsa dan Batam Aero Technic	81.81	82.05	82.25	82.64
4	Kab. Bintan	Galang Batang	75.92	76.21	76.63	77.12
5	Kab. Belitung	Tanjung Kelayang	72.46	72.51	72.57	73.16
6	Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung	64.84	66.42	66.69	70.28
7	Kab. Bogor	Lido	65.84	66.42	66.69	70.28
8	Kab. Kendal	Kendal	72.51	72.81	73.19	73.86
9	Kab. Gresik	Gresik	76.11	76.64	77.24	77.89
10	Kab. Malang	Singhasari	72.23	73.01	73.53	74.21
11	Kab. Lombok Tengah	Mandalika	68.89	69.53	70.41	71.11
12	Kab. Kutai Timur	Maloy Batuta Trans Kalimantan	74.35	74.98	75.53	76.12
13	Kota Palu	Palu	81.47	82.26	83.26	83.71
14	Kab. Minahasa Utara	Likupang	76.51	77.05	77.14	78.32
15	Kota Bitung	Bitung	74.71	75.11	75.71	76.33
16	Kab. Pulau Morotai	Morotai	62.39	63.81	64.73	65.68
17	Kab. Sorong	Sorong	66.89	67.45	68.35	68.89
18	Kota Denpasar	Sanur	84.03	84.37	84.68	85.12

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Data di atas menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota selama periode 2020-2023. Secara umum, terdapat tren peningkatan IPM di hampir semua wilayah, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Kota Denpasar mencatat IPM tertinggi sepanjang periode tersebut, yaitu meningkat dari 84,03 pada 2020 menjadi 85,12 pada 2023, mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang sudah cukup maju. Kota Batam (Nongsa dan

Batam Aero Technic) dan Kota Palu juga menunjukkan IPM yang tinggi, dengan peningkatan stabil, masing-masing mencapai 82,64 dan 83,71 pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan wilayah-wilayah ini mampu mendukung pengembangan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup penduduknya.

Namun, beberapa wilayah, seperti Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Sorong, memiliki IPM yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain, meskipun tetap menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pulau Morotai, misalnya, hanya mencapai IPM sebesar 65,68 pada 2023, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengoptimalkan potensi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Meski demikian, peningkatan yang konsisten di hampir semua wilayah menunjukkan bahwa secara keseluruhan memberikan dampak positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah dan Mohammad (2024) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi motor utama pembangunan. Ketika IPM meningkat, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Masyarakat yang lebih sehat dan terdidik cenderung lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan standar hidup melalui daya beli yang lebih tinggi mendorong konsumsi domestik, yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini bersifat saling memperkuat, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat juga memberikan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga IPM dan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh secara beriringan dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia?
5. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia?
6. Bagaimanakah pengaruh investasi, infrastruktur jalan, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.

6. Pengaruh investasi, infrastruktur jalan, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan tambahan kajian ilmu ekonomi Pembangunan, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Manfaat praktis bagi pemerintah daerah maupun pusat dari penelitian ini ialah mengidentifikasi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi masukan baik dalam penyusunan maupun evaluasi dalam program atau kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
3. Manfaat bagi investor penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan saat menentukan daerah mana yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi serta faktor-faktor yang mendukungnya.
4. Manfaat bagi masyarakat umum penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai hubungan dan beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi.
5. Salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow dan T. W. Swan merupakan penyempurnaan teori klasik sebelumnya. Menurut teori neo-klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Analisis teori ini didasarkan atau asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat penggunaan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya *output* yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Teori pertumbuhan neo klasik yang disajikan dalam fungsi Cobb-Douglas menekankan peranan modal, tenaga serta teknologi sebagai faktor produksi. Menurut Solow, pertumbuhan penduduk terdapat teknologi, walaupun teknologi masih dianggap sebagai faktor eksogen, demikian fungsi produksi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = F(K, L, X E)$$

Dimana E merupakan variabel yang disebut efisiensi tenaga kerja. $L X E$ mengukur jumlah para pekerja efektif yang memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja. Fungsi produksi ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah modal unit K dan jumlah para pekerja efektif $L X E$. ini bermakna bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L (Mankiw, 2004). Model ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sementara, akan tetapi pengembalian modal yang kian mendorong pencapaian perekonomian yang mapan akan tergantung pada kemajuan teknologi.

Hal ini mengindikasikan model pertumbuhan Solow menekankan pentingnya peranan investasi dalam proses akumulasi modal fisik (*physical capital*).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menekankan pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini sejalan dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (SDG 8) serta inovasi dan infrastruktur (SDG 9). Fokus pada efisiensi alokasi sumber daya dan peningkatan produktivitas melalui investasi teknologi mendukung tujuan SDGs untuk mengurangi kemiskinan (SDG 1) dan meningkatkan kualitas pendidikan (SDG 4), karena pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan fondasi untuk investasi sosial. Selain itu, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti efisiensi energi dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, mendukung upaya pencapaian SDGs yang terkait dengan lingkungan, seperti tindakan terhadap perubahan iklim (SDG 13) dan kehidupan di darat (SDG 15).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen merupakan bentuk penyempurnaan dari teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang mengkritisi kelemahan-kelemahan dalam pertumbuhan neoklasik. Teori ini diperkenalkan oleh para ekonom seperti Paul Romer (1986) dan Robert Lucas (1988), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam suatu negara seperti investasi di bidang pendidikan, teknologi dan Pembangunan infrastruktur (Todaro & Smith, 2015). Lucas (1998) menekankan pentingnya modal manusia (*human capital*) dalam mendukung pertumbuhan jangka Panjang dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = AK^{\alpha}(uHL)^{1-\alpha}$$

Dimana :

H : Modal manusia per pekerja

u : Proporsi waktu yang digunakan untuk bekerja (bukan belajar)

L : Tenaga kerja

A : Produktivitas total

K : Modal fisik

Berbeda dengan model Solow dalam teori neoklasik yang menganggap bahwa pertumbuhan jangka panjang hanya bergantung pada faktor eksogen seperti kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa kemajuan teknologi dapat dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dan kebijakan pemerintah yang disengaja seperti investasi pada infrastruktur jalan yang dipandang sebagai salah satu instrument penting dalam mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi (Barro & Sala-i-Martin, 2004).

Infrastruktur jalan sebagai bagian dari modal publik memiliki peran penting dalam menurunkan biaya transportasi, mempercepat arus barang dan jasa serta meningkatkan akses terhadap pasar dan sumber daya. Dengan demikian pembangunan infrastruktur jalan dapat menciptakan umpan balik positif terhadap kegiatan ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Menurut Aschauser (1989) terdapat hubungan yang signifikan antara investasi infrastuktur publik dan produktivitas sektor swasta yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan output nasional. Dengan pendekatan teori pertumbuhan endogen, pembangunan infrastruktur tidak hanya dilihat sebagai konsekuensi dari pertumbuhan tetapi juga sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2.1.3 Investasi

Investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik atau dengan kata lain investasi merupakan jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu (Isma dkk, 2018). Investasi juga merupakan kegiatan pengeluaran penanaman modal yang bertujuan membeli

barang-barang modal untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa. Hal ini sangat diharapkan untuk meningkatkan perekonomian dimasa yang akan datang.

Menurut Mankiw (2003), investasi terdiri dari barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi terbagi menjadi tiga, yaitu *business fixed investment*, *residential investment* dan *inventory investment*. *Business fixed Investment* mencakup sarana dan prasaran yang digunakan perusahaan dalam produksinya, sementara *Residential Investment* meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggali oleh pemiliknya maupun yang akan disewakan, sedangkan *Inventory Investment* adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gedung, meliputi bahan baku, persediaan, barang setengah jadi dan barang jadi. Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan (Malau dkk, 2019).

2.1.3.1 Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi terbagi menjadi dua yaitu:

1. **Investasi Pemerintah**

Investasi pemerintah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Investasi yang dilakukan pemerintah pada dasarnya tidak mengambil atau memperoleh keuntungan atas penanaman modal tersebut, penyelenggaraannya didasarkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. **Investasi Swasta**

Investasi swasta adalah penanaman modal yang dilakukan sektor swasta nasional yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta nasional atau disebut PMA (Penanaman Modal Asing). Investasi yang dilakukan pihak swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya penambahan pendapatan.

2.1.3.2 Tujuan Investasi

Tujuan investasi pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang kita harapkan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup. Apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi, maka ada tiga alasan kelompok masyarakat melakukan investasi, yaitu:

1. Untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dari hasil investasi pertahunnya.
2. Untuk jangka panjang dan memberikan hasil yang besar di masa yang akan datang.
3. Untuk kepentingan pendapatan.

2.1.3.3 Keputusan Investasi

Investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan bersifat jangka panjang. Bentuk dan komposisi dari investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung resiko atau ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. Dalam pengambilan keputusan investasi, *opportunity cost* merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu.

Menurut Tandelilin (2010) dasar keputusan investasi berada pada tingkat return harapan, return adalah alasan utama orang berinvestasi adalah memperoleh keuntungan. Tingkat keuntungan investasi merupakan suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut return atas dana yang telah di investasikan. Setiap investor dalam hal mengambil keputusan investasi, terlebih dahulu perlu menganalisis laporan keuangan agar keputusan yang diambil tidak mengandung resiko kerugian. Untuk itu investor memerlukan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari

laporan keuangan perusahaan tersebut. Keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan akan diambil investor apabila mereka menganggap bahwa investasi tersebut akan menguntungkan. Untuk mengetahuinya, investor perlu menganalisis prospek dari perusahaan tersebut, yaitu melalui kinerjanya yang tercermin di dalam laporan keuangan. Tujuan disajikan laporan keuangan investor, investor dan kreditor untuk memprediksikan, membandingkan, dan mengevaluasi aliran kas potensial bagi mereka dalam hal jumlah, waktu, dan ketidakpastiaan (Belkaoui, 2019).

2.1.3.4 Teori Investasi Keynes

Berdasarkan teori klasik, terdapat tiga faktor penentu investasi yaitu biaya, pengembalian, dan harapan atau peluang. Sedangkan berdasarkan teori investasi menurut Keynes keputusan investasi itu diambil dengan membandingkan MEC dengan tingkat bunga riil (r). MEC atau *Marginal Efficiency of Capital* adalah tingkat pengembalian ketika suatu proyek mencapai titik impas (BEP) atau singkatnya, keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi. Ketika nilai MEC lebih besar dibandingkan tingkat bunga riil, maka sebuah investasi bisa dilakukan. Tepat ketika nilai MEC sebanding dengan nilai r , maka tidak ada lagi penanaman dana pada aset investasi yang memperoleh penghasilan. Dan ditulis dengan formulasi fungsi sebagai berikut :

$$I = f(MEC, r)$$

Dimana :

I : Investasi

MEC : Marginal Efficiency of Capital (tingkat pengembalian modal marjinal)

r : Suku Runga

Teori investasi menurut Keynes juga menyebutkan bahwa jumlah atau banyaknya investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian atau satu faktor saja, namun dipengaruhi juga oleh biaya modal atau tingkat bunga. Investasi akan dikatakan menguntungkan hingga suatu titik di mana nilai MEC dengan biaya modal ada pada tingkat yang sama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan berdasarkan teori investasi Keynes adalah sebagai berikut:

1. Tingkat optimisme dari para manajer
2. Tingkat laju pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan modal saham publik
4. Perubahan teknologi
5. Perubahan tingkat bunga

2.1.4 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur merupakan prasarana sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat di definisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodoatie, 2003).

Pemerintah melalui peratutan Presiden Nomer 42 Tahun 2005 tentang komite percepatan penyediaan infrastruktur. Menjelaskan jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur oleh pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur tenaga listrik, dan infrastruktur pengakutan gas dan minyak bumi. Penggolongan infrastruktur diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan masyarakat luas sehingga perlu dia atur oleh pemerintah.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi baik di wilayah desa hingga wilayah kota, infrastruktur jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya yang menyebabkan perputaran

ekonomi makin pesat. Wahyuni (2009) apabila prasarana jalan rusak dan buruk alokasi sumber daya menjadi terhambat, pendistribusian faktor produksi, pembangunan industri, jasa dan barang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan.

Menurut Undang-undang Nomor 38 (2004), dari segi fungsinya jalan umum dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Selain itu lokasi industri sangat tergantung pada biaya transportasi seperti yang dinyatakan teori lokasi dan aksesibilitas (*Weber's Theory of Industrial Location*). Jalan yang baik akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya tarik wilayah sebagai lokasi investasi. Infrastruktur jalan mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat jaringan ekonomi antar wilayah yang di formulasikan dalam persamaan sebagai berikut.

$$A_i = \sum_j \frac{O_j}{C_{ij}^\beta}$$

Keterangan :

A_i : Aksesibilitas lokasi i

O_j : Aktivitas ekonomi atau peluang di lokasi j

C_{ij}^β : Biaya, waktu, atau jarak dari lokasi i ke lokasi j

β : Parameter sensitivitas terhadap biaya atau jarak

Semakin besar nilai A_i semakin tinggi aksesibilitas suatu Lokasi

Teori dualisme ekonomi (Boeke & Lewis), teori ini menyatakan bahwa pembangunan tidak merata antara wilayah modern dan tradisional. Infrastruktur jalan membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah sehingga

menjembatani kesenjangan antarwilayah tersebut. Teori dualisme ekonomi dikembangkan dalam salah satu model diantaranya yaitu sebagai berikut.

$$Y = Y_m + Y_A$$

Keterangan :

Y = Total output nasional

Y_m = Output sektor agraris/manual

Y_A = Output sektor industri/modern

Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki transportasi, mengurangi biaya logistik, dan memperluas akses pasar, sehingga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor pariwisata, pertanian, dan manufaktur yang menciptakan efek multiplier serta mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur agar mempertahankan dan meningkatkan pembangunan ekonomi regional. Secara simultan Pembangunan jalan dan jembatan secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi regional (Andrianto et al, 2024).

2.1.5 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi dan ketenagakerjaan suatu negara. TPAK mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase, dan dapat dituliskan dengan rumus berikut ini.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK meliputi tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, budaya, serta kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat pendidikan biasanya berkorelasi positif dengan partisipasi angkatan kerja, karena individu yang memiliki keterampilan lebih tinggi cenderung lebih mudah terserap dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti program pelatihan kerja dan

dukungan kewirausahaan, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan TPAK. Penelitian oleh Becker (1993) mengemukakan bahwa investasi pada modal manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan, dapat meningkatkan partisipasi kerja sekaligus produktivitas tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan strategis seperti Kabupaten/Kota) di Indonesia. TPAK mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang menjadi salah satu komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan TPAK menunjukkan keberhasilan kawasan tersebut dalam menciptakan lapangan kerja dan menarik angkatan kerja ke sektor-sektor produktif, seperti industri, jasa, dan pariwisata. Adanya peningkatan TPAK, produktivitas daerah cenderung meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun nasional.

Selain itu, TPAK juga dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan pemerintah sebagai penggerak ekonomi daerah. Kawasan Ekonomi Khusus dirancang untuk menarik investasi, meningkatkan perdagangan, dan menciptakan peluang kerja yang lebih besar. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi mengindikasikan keberhasilan dalam menyediakan akses terhadap pekerjaan yang layak dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal. Sebaliknya, jika TPAK rendah, hal ini dapat mengindikasikan tantangan seperti kurangnya keterampilan tenaga kerja, ketimpangan gender dalam partisipasi kerja, atau kurangnya daya tarik lapangan kerja di kawasan tersebut. Oleh karena itu, analisis TPAK memberikan perspektif penting dalam mengevaluasi determinan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Indonesia.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber daya ekonominya untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD mencakup hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Fungsi utama PAD adalah memberikan kontribusi terhadap kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2020).

Sebagai indikator kemandirian fiskal, PAD berperan dalam menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu mengelola sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah, misalnya, menjadi sumber utama PAD yang berasal dari kontribusi langsung masyarakat, seperti pajak hotel, restoran, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, retribusi daerah berasal dari pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar PAD, semakin besar pula peluang daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (Halim, 2019).

Faktor-faktor yang memengaruhi PAD mencakup potensi ekonomi daerah, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Daerah dengan potensi ekonomi yang besar, seperti sektor pariwisata atau industri, cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan potensi ekonomi yang terbatas. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan pajak serta retribusi juga memengaruhi efektivitas penggalan PAD (Mahmudi, 2021).

Namun, tantangan dalam peningkatan PAD masih dihadapi oleh banyak daerah, terutama daerah dengan tingkat perekonomian rendah atau yang baru berkembang. Ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih tinggi di beberapa daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui inovasi kebijakan, peningkatan pelayanan publik, dan pengelolaan potensi lokal yang lebih optimal. Dengan demikian, PAD tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Saragih, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk mendukung pembangunan. Peningkatan PAD seringkali terjadi seiring dengan pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi yang didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. PAD yang meningkat dapat memberikan pemerintah daerah kemampuan finansial untuk menyediakan infrastruktur, layanan publik, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Persentase realisasi PAD adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi penerimaan PAD terhadap target atau rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan rumus dari persentase realisasi PAD.

$$\text{Persentase PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat berkontribusi pada peningkatan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi. Misalnya, sektor industri yang berkembang dapat menciptakan *multiplier effect* berupa peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak seperti pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas pengelolaan PAD bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang inovatif dan berkelanjutan.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup suatu populasi di berbagai negara. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator

harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (UNDP, 2023).

IPM memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara. Terkait konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi metodologi UNDP untuk mengukur IPM di tingkat nasional dan daerah. Peningkatan IPM sering dikaitkan dengan keberhasilan program-program pembangunan yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Seperti yang tertulis dalam model berikut.

$$IPM = \frac{1}{3}(\text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Daya Beli}) \times 100$$

Adapun tiga komponen IPM dapat ditulis sebagai berikut.

1. Indeks Kesehatan (IK)

Dihitung dari indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

$$IK = \frac{UHH - 25}{85 - 25}$$

Batas bawaah usia 25 tahun, dan batas atas usia 85 tahun.

2. Indeks Pendidikan (IP)

Gabungan antar dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Diimana batas atas RLS 15 tahun dan batas atas HLS adalah 18 tahun. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IP = \frac{1}{2} \left(\frac{RLS}{15} + \frac{HLS}{18} \right)$$

3. Indeks Daya Beli (IDB)

Dihitung dari pengeluaran per kapita (dalam rupiah yang disesuaikan), Dimana batas bawah senilai satu juta rupiah, dan batas atas senilai lima belas juta rupiah. Serta digunakan logaritma dikarenakan adanya *diminishing returns* yaitu pengeluaran besar tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup secara proporsional. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IDB = \frac{\text{Log}(\text{engeluaran per kapita}) - \text{Log}(1.000.000)}{\text{Log}(15.000.000) - \text{Log}(1.000.000)}$$

Selain sebagai indikator keberhasilan pembangunan, IPM juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah memanfaatkan data IPM untuk menentukan prioritas alokasi anggaran dan merancang program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan. Peningkatan IPM secara signifikan dapat menjadi indikator keberhasilan intervensi kebijakan dalam jangka panjang (Todaro dan Smith, 2020).

Sebagai indikator pembangunan manusia, IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan salah satu determinan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Peningkatan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang diukur melalui IPM dapat menciptakan SDM yang lebih produktif dan inovatif. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan IPM secara berkelanjutan melalui efek umpan balik positif

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian sebelumnya. Berikut merupakan tabel dari penelitian terdahulu.

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

Peneliti/Judul	Hasil Penelitian
Hameed Khana, Umair Khanb, Li Jun Jiang, dan Muhamad Asif Khan (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara infrastruktur dan pertumbuhan PDB. Hubungan dalam jangka pendek, semua koefisien menjadi tidak signifikan kecuali infrastruktur global.
<i>Impact of Infrastructure on Economic Growth in South Asia:</i>	

Peneliti/Judul	Hasil Penelitian
<i>Evidence from Pooled Mean Group Estimation</i>	
Zhen Yu dan To Boi Luu (2022) <i>Evaluating The Effect of Transport Infrastructure on The Employment in Vietnam</i>	Hasil dari <i>System Generalized Method of Moments</i> (System-GMM) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dapat meningkatkan lapangan kerja secara signifikan di berbagai sektor. Data menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran konektivitas seluruh perekonomian nasional, regional, dan lokal. Hal ini mengurangi biaya transportasi dan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja.
Nataliya Volovik, Alexey Ponomarev, et al (2023) <i>Impact of Special Economic Zones on Domestic Market: Evidence from Russia</i>	Hasil penelitian menyebutkan bahwa <i>Special Economic Zones</i> (SEZ) di Rusia mendorong produksi barang substitusi impor, terutama di sektor manufaktur. Serta adanya peningkatan pada investasi domestik, dan terjadinya peningkatan pada kapasitas industri lokal di wilayah SEZ.
Desi Sulastris Ambarita, Sirozujilam, dan Raina Linda Sari (2024) <i>The Influence of Infrastructure Development on The Economic Growth of North Sumatra Province</i>	Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada wilayah Pesisir Timur dan dataran tinggi, sedangkan pada wilayah Pesisir Barat dan kepulauan mempunyai pengaruh negatif namun signifikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempunyai dampak positif dan signifikan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah kepulauan yang pengaruhnya tidak signifikan. Infrastruktur kelistrikan memberikan dampak positif dan signifikan di seluruh wilayah, infrastruktur jalan memberikan dampak positif dan signifikan di wilayah pantai barat dan dataran tinggi, dan untuk wilayah pantai timur dan kepulauan berdampak positif namun tidak signifikan.
Prawidya Hariyani R dan Efen Silvia (2021) Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun	Hasil menunjukkan infrastruktur pembangunan KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun terus meningkat kecuali panjang jalan yang tidak mengalami perkembangan. Berdasarkan model dalam analisis, infrastruktur jalan positif tidak signifikan, listrik positif signifikan, dan air bersih negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dan keberadaan KEK Sei

Peneliti/Judul	Hasil Penelitian
	Mangkei berpengaruh positif terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun terutama dalam hal sosial ekonomi masyarakat.
Firsta Reynalda Azzahra, Najamuddin Khairur Rijal, dan Devita Prinanda (2022) Dampak Ekspor-Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam, hal ini ditunjukkan bahwa ekspor di Batam berkontribusi besar terhadap permintaan tenaga kerja, peningkatan jumlah produksi, dan juga devisa negara. Sementara impor memenuhi kebutuhan barang yang tidak bisa di produksi di dalam negeri dan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jinzhao Zhao (2020) <i>Effect of Special Economic Zoned on FDI in Emerging Economies: Does Institutional Quality Matter?</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>Difference-in-Differences</i> (DID) dan model regresi panel yang menyebutkan bahwa <i>Special Economic Zones</i> (SEZ) di Tiongkok secara signifikan meningkatkan <i>Foreign Direc Investmen</i> (FDI). Sedangkan variabel kontrol seperti infrastruktur jalan, biaya tenaga kerja, dan jumlah penduduk secara statistik dapat menghilangkan bias.
Taufiqurrahman dan Khoirunorrofik (2023) Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Investasi di Indonesia	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi investasi dibandingkan dengan wilayah yang tidak memiliki KEK. Serta variabel belanja daerah dan jumlah usaha besar-menengah berkontribusi secara positif juga terhadap investasi.
Firsta Ayu Fitria Asmoro, Maulidyah dan Fakhrudin (2022) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021	Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan hasil menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Sementara Tenaga Kerja tidak memiliki pengaruh signifikan yang dimungkinkan karena adanya kualitas tenaga kerja yang belum optimal pada Kabupaten Karanganyar.
Irma Ainun Nasyri, Iwan Harsono et.al (2024) Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022	Hasil penelitian menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan bahwa semua komponen data Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara secara parsial pengeluaran per kapita, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif

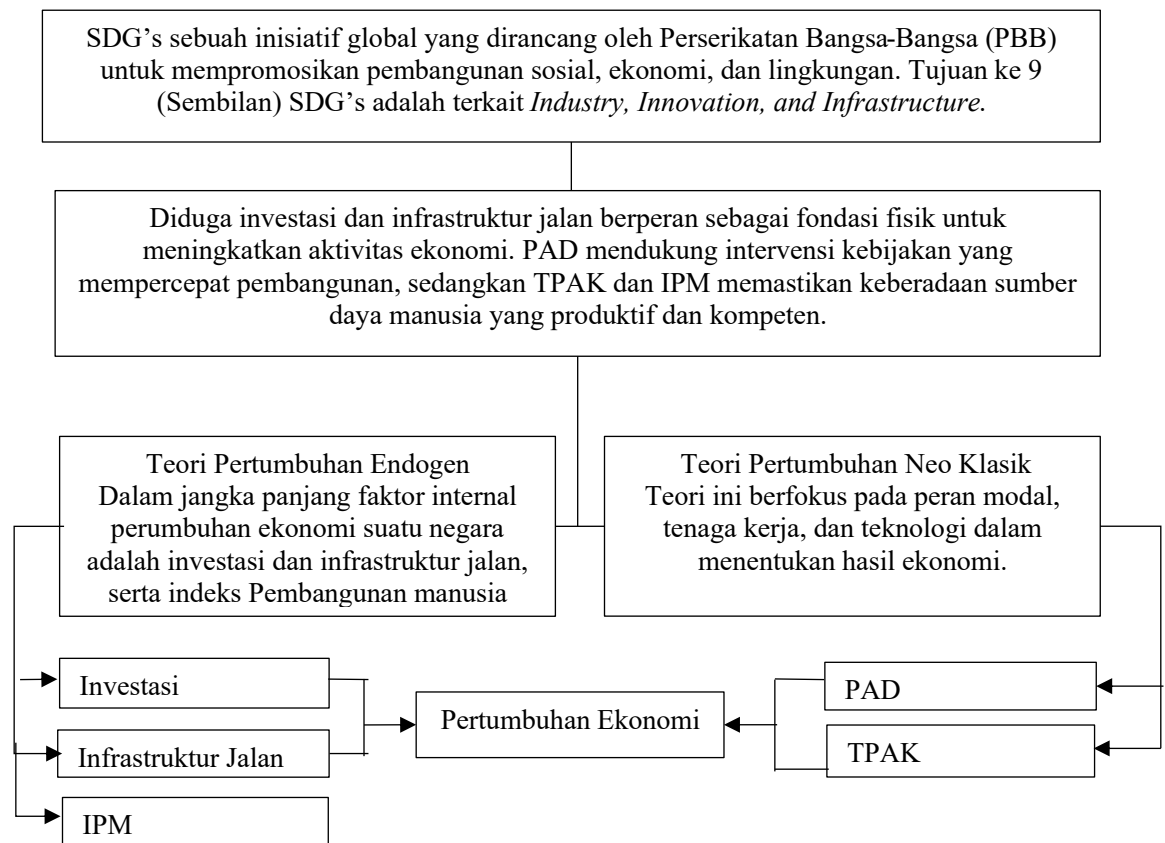
Peneliti/Judul	Hasil Penelitian
	signifikan. Hal ini berbeda dengan hasil secara parsial untuk variabel harapan lama sekolah dan angka harapan hidup yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB.
Windy Riqul Aini, Arista Rahmahita et.al (2024) Analisis Pengaruh Investasu dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020	Menggunakan Regresi Linier Berganda (OLS) bahwa investasi dan teanaga kerja belum secara langsung memberikan dorongan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Than Nhan Dinh A, Wen-Min Lu B et.al (2025) <i>Special Economic Zones and Sustainable Development: A Study in Provinces of China</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Special Economic Zones</i> (SEZ) di China menunjukkan adanya potensi yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan jika sumber daya ditingkatkan dan diperkuat juga dengan output ekonomi. Selain itu, SEZ di China dapat menciptakan lapangan kerja yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat China.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berfokus pada hubungan antara investasi, infrastruktur jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia. Secara konseptual, kerangka ini mengintegrasikan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut secara sinergis memengaruhi output ekonomi daerah. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDG) tujuan ke-9 yang terkait dengan *Industry, Innovation, and Infrastructure*, investasi dan infrastruktur jalan dianggap sebagai fondasi fisik yang mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, PAD memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan TPAK serta IPM memastikan keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.

Kerangka ini teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dan pertumbuhan endogen sebagai landasan teoretis. Infrastruktur jalan yang memadai dapat mempercepat mobilitas barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Teori Neo Klasik menekankan peran modal (investasi), tenaga kerja, dan teknologi dalam mendorong hasil ekonomi. Investasi yang masuk berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, variabel independen dalam kerangka pemikiran ini saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dan infrastruktur jalan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. PAD mendukung alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, sedangkan TPAK dan IPM memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja yang produktif. Dengan kombinasi teori dan pendekatan praktis ini, kerangka pemikiran memberikan dasar untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel tersebut berkontribusi secara kolektif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ho1 Investasi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ha1 Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ho2 Infrastruktur jalan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ha2 Infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ho3 Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.

- Ha3 Penapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ho4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ha4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ho5 Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ha5 Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ho6 Investasi, infrastruktur jalan, Pendapatan asli daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Ha6 Investasi, infrastruktur jalan, Pendapatan asli daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan berpengaruh bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh investasi, infrastruktur jalan, pendapatan asli daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini melibatkan 14 kota/kabupaten di Indonesia yang juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus dengan periode waktu selama tahun 2020-2023.

Sampai dengan tahun 2023 kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Kawasan ekonomi khusus adalah 19 kabupaten/kota. Namun dalam penelitian ini pertimbangan hanya 14 kabupaten/kota yang diambil karena menurut PP Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 40 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa proses Pembangunan infrastruktur Kawasan ekonomi khusus paling lama 36 bulan dan satu tahun masa resistensi. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 12. Adapun 14 Kabupaten/kota yang termasuk diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Data Objek Penelitian

No	Nama KEK	Lokasi	Tahun Bediri
1	Arun Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	2018
2	Sei Mangkei	Kab. Simalungun	2013
3	Galang Batang	Kab. Bintan	2018
4	Tanjung Kelayang	Kab. Belitung	2017
5	Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang	2013
6	Kendal	Kab. Kendal	2020
7	Singhasari	Kab. Malang	2020
8	Mandalika	Kab. Lombok Tengah	2015
9	Maloy Batuta Trans Kalimantan	Kab. Kutai Timur	2015
10	Palu	Kota Palu	2015
11	Likupang	Kab. Minahasa Utara	2020
12	Bitung	Kota Bitung	2014
13	Morotai	Kab. Pulau Morotai	2015
14	Sorong	Kab. Sorong	2017

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang telah diolah dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait dengan topik penelitian. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka dan merupakan data panel dengan kombinasi data runtut waktu (*time series*) periode 2020-2023 dan data *cross section* sebanyak 14 kabupaten/kota.

Tabel 10. Deskripsi Data

Nama Variabel	Simbol	Skala	Sumber Data	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen	BPS	Persentase pertumbuhan ekonomi di suatu kabupaten/kota
Investasi	LogINV	Milyar Rupiah	Laporan Perkembangan KEK	Realisasi investasi yang tercapai terhadap target yang di tetapkan
Infrastruktur Jalan	LogIJ	Kilo Meter	BPS	Akumulasi panjang jalan raya yang terdapat dalam kabupaten/kota
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Persen	BPS	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target atau rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK	Persen	BPS	Persentase penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja
Indeks Pembangunan	IPM	Indeks	BPS	Ukuran atau indikator

Manusia

komposit yang mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah

Penggunaan model Lin-Log dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik variabel independen yang mengalami transformasi logaritma, seperti LogINV (Investasi) dan LogIJ (Infrastruktur Jalan). Transformasi ini bertujuan untuk mengatasi distribusi data yang bias dan memperbaiki linearitas hubungan antara variabel independen dan dependen. Model Lin-Log memungkinkan interpretasi koefisien regresi sebagai perubahan absolut pada variabel dependen akibat perubahan persentase pada variabel independen, yang sangat relevan dalam konteks ekonomi (Pedace, 2016).

Selain itu, transformasi logaritma pada variabel independen membantu mengurangi heteroskedastisitas dan meningkatkan keandalan estimasi model. Model Lin-Log tidak hanya memperbaiki asumsi statistik dasar dalam regresi, tetapi juga memberikan interpretasi yang lebih bermakna terhadap hubungan antara variabel.

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota. PDRB dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi karena merupakan akumulasi akhir dari berbagai macam sektor perekonomian. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan karena menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk tahunan yang diperoleh dari *website* resmi BPS dalam runtut waktu 2020-2023.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$PDRB_t$ = PDRB tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Investasi merupakan pengeluaran atau penanaman modal oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Dimana jumlah investasi yang benar-benar telah direalisasikan dalam suatu periode waktu tertentu oleh investor domestik maupun asing dengan melalui proses perencanaan sebelumnya dan telah di catat dalam laporan perkembangan Kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

Infrastruktur jalan merupakan akumulasi dari semua total panjang jalan yang ada di Kabupaten/Kota dengan kondisi jalan baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Data infrastruktur jalan diperoleh dari statistik BPS.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini menggunakan data persentase realisasi PAD dengan satuan persen. Persentase realisasi PAD adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi penerimaan PAD terhadap target atau rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan rumus dari persentase realisasi PAD.

$$\text{Persentase PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada penelitian ini mengukur persentase jumlah angkatan kerja (masyarakat yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan) terhadap jumlah penduduk usia kerja di suatu wilayah atau negara dan dapat dituliskan dengan rumus berikut ini.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (2024) adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang

dan sehat, pengetahuan, dan standar layak hidup. IPM pada penelitian ini diperoleh dari BPS dan menggunakan satuan indeks.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode panel dinamis *Generalized Method of Moment* (GMM). Berbeda dengan penerapan regresi data panel statis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka pendek, penerapan regresi data panel dinamis bisa diterapkan guna menjelaskan hubungan jangka panjang dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini sesuai penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi yang analisisnya diperlukan dalam jangka panjang. Penelitian ini menggabungkan data *cross section* serta *time series*, sehingga membentuk data panel. Tujuan penggunaan analisis ini ialah mengkaji hubungan satu variabel terikat bersama variabel-variabel lain yang mengikatnya atau variabel bebasnya guna mencari hubungan variabel terikat dan variabel pengikatnya dan seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat.

Berdasarkan data pada variabel dalam penelitian ini, terdapat jumlah periode waktu sebanyak empat tahun yaitu tahun 2020-2023 dan jumlah objek penelitian sebanyak 14 wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini menggunakan persamaan model regresi data panel dinamis sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it-1} + \beta_2 LogINV_{it} + \beta_3 LogIJJ_{it} + \beta_4 PAD_{it} + \beta_5 TPAK_{it} + \beta_6 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

PE_{it}	= Pertumbuhan Ekonomi
PE_{it-1}	= Lag Pertumbuhan Ekonomi
$\beta_0-\beta_6$	= Konstanta
$LogINV_{it}$	= Investasi
$LogIJJ_{it}$	= Infrastruktur Jalan
PAD_{it}	= Pendapatan Asli Daerah
$TPAK_{it}$	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
IPM_{it}	= Indeks Pembangunan Manusia
ε_{it}	= <i>error term</i>
i	= unit sektor
t	= unit waktu

3.4.1 Pengujian Estimasi Model

Pengujian estimasi model menggunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) di Stata dilakukan untuk mengatasi masalah endogenitas, heteroskedastisitas, dan korelasi serial dalam model regresi. Penggunaan Aplikasi Stata umumnya meliputi mendefinisikan variabel dependen dan independen, menentukan instrumen yang valid, serta memilih jenis GMM yang sesuai, seperti Difference GMM (menggunakan perbedaan tingkat sebagai instrumen) atau System GMM (menggabungkan perbedaan dan level). Setelah estimasi, pengujian validitas instrumen dan asumsi model dilakukan melalui uji Hansen/Sargan untuk validitas instrumen dan uji Arellano-Bond untuk korelasi serial. Pengujian ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan model estimasi memberikan hasil yang konsisten dan efisien.

1. *First-Different Generalized Method of Moment (FD-GMM)*

Model pertama adalah *First-Difference Generalized Method of Moments* (FD-GMM), yang juga dikenal sebagai Arellano-Bond Generalized Method of Moments (AB-GMM). Dalam model data panel dinamis, instrumen tambahan dapat diperoleh dengan memanfaatkan kondisi ortogonalitas, yaitu tidak adanya korelasi antara nilai lag yityit dan gangguan vitvit, sebagaimana dijelaskan oleh Arellano dan Bond (1991). Pada kondisi awal (initial model), persamaan FD-GMM dirumuskan sebagai berikut (Baltagi, 2005).

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + u_{it} \quad i = 1, \dots, N ; t = 1, \dots, T$$

Di mana $u_{it} = \mu_{it} + v_{it}$ dengan $\mu_{it} \sim IID(0, \sigma_{\mu}^2)$ dan $v_{it} \sim IID(0, \sigma_v^2)$, saling bebas satu sama lain. Untuk mendapatkan estimasi δ yang konsisten untuk $N \rightarrow \infty$ dengan T tetap, persamaan berikut ditransformasi ke dalam bentuk first difference untuk menghilangkan efek individu (Baltagi, 2005).

$$y_{it} - y_{i,t-1} = \delta(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + (v_{it} - v_{i,t-1})$$

Di mana $(v_{it} - v_{i,t-1})$ adalah MA(1) dengan akar unit. Penduga AB-GMM dapat terkendala oleh bias sampel terbatas (Blundell & Bond, 1998). Keberadaan bias sampel terbatas dapat dideteksi dengan mengkomparasi hasil AB-GMM dengan

penduga alternatif dari parameter autoregresif. Dalam *Autoregressive(1)* atau *AR(1)*, *pooled least square* akan memberikan suatu estimasi dengan bias ke atas (*biased upward*) dengan keberadaan pengaruh individu (*individual-specific effect*). Di sisi lain *fixed effect* akan memberikan dugaan dengan bias ke bawah (*biased downward*). Selanjutnya penduga konsisten dapat diekspektasi di antara penduga *pooled least square* dan *fixed effect*. Bila penduga AB-GMM dekat atau dibawah penduga *fixed effect* maka kemungkinan penduga AB-GMM akan *biased downward* yang dapat disebabkan oleh lemahnya instrumen (Baltagi, 2005).

2. *Arellano-Bond System Generalized Method of Moment (SYS-GMM)*

Model yang kedua adalah Blundell dan Bond System GMM (Sys-GMM). (Blundell & Bond, 1998) meninjau kembali pentingnya memanfaatkan kondisi awal dalam menghasilkan penduga yang efisien model data panel dinamis ketika T (periode waktu penelitian) berukuran kecil. Blundell dan Bond mempertimbangkan model data panel autoregresif sederhana tanpa regressor eksogen (Baltagi, 2005).

$$Y_{it} = \delta y_{i,t-1} + \mu_i + v_{it}$$

Dengan $E(\mu_i) = 0$, $E(v_{it}) = 0$ dan $E(\mu_i v_{it}) = 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, N$; $t = 1, 2, \dots, T$ (Blundell & Bond, 1998) fokus pada kasus di mana $T = 3$ dan oleh karena itu hanya ada satu kondisi ortogonalitas yang diberikan oleh $E(y_{i1} \Delta v_{i3}) = 0$, sehingga δ dapat teridentifikasi. Dalam hal ini, regresi tahap pertama diperoleh dengan meregresikan Δy_{i2} pada y_{i1} (Baltagi, 2005).

Blundell dan Bond menghubungkan bias dan presisi yang buruk dari estimator FD-GMM dengan instrumen yang lemah dan dicirikan dengan konsentrasi parameternya. Selanjutnya, Blundell dan Bond menunjukkan bahwa pembatasan stasioneritas ringan tambahan pada proses kondisi awal memungkinkan penggunaan estimator SYS-GMM diperluas menggunakan perbedaan lag dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan di tingkat level, selain tingkat lag dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan dalam first differences. Penduga SYS-GMM terbukti memiliki peningkatan efisiensi dibandingkan dengan FD-GMM karena $\delta \rightarrow 1$ dan $(\sigma_{\mu}^2/\sigma_u^2)$ meningkat (Baltagi, 2005).

3.4.2 Penentuan Model Estimasi Terbaik

Penentuan model estimasi terbaik dalam GMM atau panel dinamis tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Jika data panel bersifat dinamis dan terdapat endogenitas dalam variabel, GMM menjadi pilihan utama karena kemampuannya menangani masalah tersebut melalui penggunaan instrumen internal. Difference-GMM cocok untuk data dengan jumlah individu (N) besar dan periode waktu (T) kecil, sementara System-GMM lebih efisien untuk variabel dependen yang sangat persisten karena memanfaatkan instrumen dari persamaan dalam level dan perbedaan. Pemilihan model terbaik juga dipandu oleh hasil uji validitas instrumen (seperti uji Sargan atau Hansen) serta uji spesifikasi model (misalnya uji Arellano-Bond untuk korelasi serial). Selain itu, jika asumsi heteroskedastisitas dan korelasi serial tidak terpenuhi, penyesuaian seperti estimator robust perlu digunakan untuk meningkatkan keakuratan estimasi.

Secara singkat dalam menentukan atau memilih model terbaik pada data panel dinamis, dilakukan pengujian menggunakan 3 kriteria yakni validitas instrumen, konsistensi dan tidak bias.

1. Uji Validitas Model (Uji Sargan)

Uji Sargan adalah metode yang digunakan untuk menguji validitas instrumen dalam model estimasi Generalized Method of Moments (GMM). Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam model adalah eksogen, yaitu tidak berkorelasi dengan error term.

Hasil uji Sargan diinterpretasikan melalui nilai p-value: jika $p\text{-value} > 0,05$ (dengan tingkat signifikansi 5%), maka instrumen dianggap valid karena hipotesis nol (instrumen eksogen) tidak ditolak. Sebaliknya, jika $p\text{-value} < 0,05$, maka terdapat indikasi bahwa instrumen mungkin tidak valid, sehingga hasil estimasi model bisa bias. Uji Sargan sangat penting untuk memastikan keandalan hasil analisis, terutama dalam konteks data panel dinamis yang rentan terhadap masalah endogenitas. Namun, uji ini lebih sesuai digunakan dalam model dengan asumsi homoskedastisitas; jika terdapat heteroskedastisitas, uji Hansen sering dianggap lebih tepat (Baltagi, 2005).

2. Uji Konsistensi Model (Uji Arellano-Bond)

Uji konsistensi model menggunakan Arellano-Bond merupakan metode yang sering digunakan dalam analisis data panel dinamis untuk mengatasi masalah endogenitas dan autokorelasi dalam model regresi. Uji ini memanfaatkan instrumen internal, yaitu lag dari variabel independen atau dependen, untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias. Konsistensi model dalam Arellano-Bond diuji menggunakan uji serial korelasi residual Arellano-Bond (AR test), khususnya AR(1) dan AR(2). AR(1) biasanya signifikan karena adanya perbedaan, namun AR(2) harus tidak signifikan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid, dan tidak ada autokorelasi tingkat kedua dalam residual. Hal ini penting untuk menjamin bahwa model estimasi memberikan hasil yang reliabel (Arellano, 2003).

Uji Konsistensi Model (Uji Arellano-Bond), hipotesis yang diuji pada tahap uji autokorelasi residual (AR test) adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada autokorelasi serial tingkat kedua pada residual. Residual tidak menunjukkan autokorelasi AR(2), yang menunjukkan bahwa instrumen valid.
2. Hipotesis Alternatif (H_1): Ada autokorelasi serial tingkat kedua pada residual. Residual menunjukkan adanya autokorelasi AR(2), yang menunjukkan bahwa instrumen tidak valid.

Jika hasil uji menunjukkan bahwa AR(2) tidak signifikan ($p\text{-value} > 0,05$), maka H_0 diterima, dan model dianggap konsisten karena instrumen yang digunakan valid. Sebaliknya, jika AR(2) signifikan ($p\text{-value} \leq 0,05$), maka H_0 ditolak, dan model dianggap tidak konsisten.

3. Uji Ketidakbiasan Pada Model

Uji ketidakbiasan pada model bertujuan untuk memastikan bahwa estimasi parameter dalam model tidak bias, yaitu nilai estimasi rata-rata mendekati nilai sebenarnya dari parameter populasi. Model *Generalized Method of Moments* (GMM), ketidakbiasan sering diuji melalui validitas instrumen dan asumsi independensi error term.

Suatu model GMM dikatakan sudah memenuhi kriteria ‘tidak bias’ apabila estimator (penduga) model GMM yang digunakan berada di antara estimator Fixed Effect Model (FEM) dan Pooled Least Square (PLS). Dengan kata lain, sebuah model dikatakan tidak bias apabila nilai koefisien dari variabel lag dependen atau lag(Y) pada model GMM berada pada rentang antara nilai koefisien dari variabel lag dependen pada model FEM dan PLS.

3.3.4 Uji Signifikansi

Uji Signifikansi Dalam analisis data panel dinamis, uji signifikansi secara parsial menggunakan Uji z. Menurut Gujarati & Porter (2009), uji z digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika probabilitas z-Statistik lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji melalui Uji z untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pada hipotesis model pertama yakni sebagai berikut.

1. Variabel Investasi (X1)

Ho : $\beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh positif dari investasi (X1) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

Ha : $\beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara investasi (X1) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

2. Variabel Infrastruktur Jalan (X2)

Ho : $\beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh positif dari infrastruktur jalan (X2) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

Ha : $\beta_2 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara infrastruktur jalan (X2) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X3)

Ho : $\beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh positif dari pendapatan asli daerah (X3) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

$H_a : \beta_3 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah (X3) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

4. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X4)

$H_o : \beta_4 = 0$, tidak ada pengaruh positif dari tingkat partisipasi angkatan kerja (X4) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

$H_a : \beta_4 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat partisipasi angkatan kerja (X4) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

5. Variabel Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (X5)

$H_o : \beta_5 = 0$, tidak ada pengaruh positif dari indeks pembangunan manusia (X4) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

$H_a : \beta_5 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia (X5) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y)

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian merupakan ringkasan dari temuan utama yang diperoleh selama proses penelitian. Kesimpulan ini merangkum hasil-hasil yang relevan, menjawab pertanyaan penelitian, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

1. Investasi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia.
2. Infrastruktur jalan raya tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia.
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia.
5. Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia.

5.2 Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan hasil penelitian merujuk pada dampak atau rekomendasi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan (seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi) berdasarkan temuan penelitian. Implikasi kebijakan ini berfungsi sebagai dasar untuk perumusan langkah-langkah kebijakan yang lebih baik atau penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada.

1. Sama halnya dengan infrastruktur jalan, investasi juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang dapat menarik lebih banyak investasi seperti Pemerintah daerah dan para pengelola kebijakan perlu menyusun *investment roadmap* berbasis klaster industri lokal untuk menarik investasi yang sesuai dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten dengan melakukan promosi yang disesuaikan dengan pasar negara investor potensial yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara baik domestik maupun asing.
2. Meskipun infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di KEK dalam jangka panjang. Investasi dalam infrastruktur ini harus diprioritaskan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan ekonomi jangka panjang.
3. Sama halnya dengan infrastruktur jalan, investasi juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang dapat menarik lebih banyak investasi seperti Pemerintah daerah dan para pengelola kebijakan perlu menyusun *investment roadmap* berbasis klaster industri lokal untuk menarik investasi yang sesuai dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten dengan melakukan promosi yang disesuaikan dengan pasar negara investor potensial yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara baik domestik maupun asing.
4. Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat lebih menjaga keseimbangan

antara daya tarik wilayah kabupaten/kota dan kepentingan fiskal daerah dengan membuat mekanisme bagi hasil PAD yang bersumber dari retribusi tertentu seperti izin usaha yang masih bisa dikenakan

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terbukti tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, namun memiliki pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong migrasi tenaga kerja inklusif dan berkualitas dengan menciptakan insentif bagi pekerja terampil dari luar daerah guna mengisi gap keterampilan di wilayah kabupaten/kota, tanpa mengabaikan tenaga kerja lokal. Serta menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dengan melakukan pelatihan keterampilan dan peningkatan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
6. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, IPM memiliki dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya harus diprioritaskan untuk mendukung pengembangan SDM yang berkualitas. Adanya SDM yang lebih baik, daerah akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan dibentuknya pusat pelatihan yang fokus pada keterampilan praktis dan teknis di sekitar wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan sektor unggulan masing-masing Kawasan. Serta perlu mempertahankan perluasan akses dan layanan infrastruktur sosial seperti fokus dalam pembangunan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., Harsono, I., & Kunci, K. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1).
- Aggarwal, A. (Ed.). (2022). *Special Economic Zones in the Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle*: <https://doi.org/10.22617/TCS210449-2>
- Andrianto, A., Udiansyah, U., & Yunani, A. (2024). Effects of Road and Bridge Infrastructure Development on the Local Economy in Tabalong Regency. *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 2(03), 333–346. <https://doi.org/10.59653/pancasila.v2i03.1034>
- Asmoro, F. A. F., Hasmarini, M. I., & Fakhruddin, H. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1788. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.3023>
- Azzahra, F. R., Najamuddin Khairur Rijal, & Devita Prinanda. (2022). Dampak Ekspor-Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 69–82. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.16>
- Baerlocher, D., Parente, S. L., & Rios-Neto, E. (2021). Female Labor Force Participation and economic growth: Accounting for the gender bonus. *Economics Letters*, 200. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109740>
- Bakoup, F. (2013). *Promoting Economic Reforms In Developing Countries: Rethinking Budgetary Aid ?*
- Brueckner, M. (2021a). Infrastructure and Economic Growth. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm14110543>
- Brueckner, M. (2021b). Infrastructure and Economic Growth. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm14110543>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2022). *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021*. 1–226.
- Diantari, N. P., & Wirathi, A. P. (2023). PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN INVESTASI PEMERINTAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI BALI. *E-Jurnaal EP UNUD*, 1(2).
- Dinh, T. N., Lu, W. M., Kuo, K. C., & Nguyen, D. T. (2025). Special economic zones and sustainable development: A study in provinces of China. *Sustainable Futures*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100864>
- Dubinina, E. (2023). Impact of Special Economic Zones on domestic market: Evidence from Russia. *Post-Communist Economies*, 35(1), 82–99. <https://doi.org/10.1080/14631377.2022.2138154>

- Durongkaveroj, W. (2023a). The economic impact of special economic zones: Evidence from Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(2), 377–386. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.2.07>
- Durongkaveroj, W. (2023b). The economic impact of special economic zones: Evidence from Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(2), 377–386. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.2.07>
- Eludire, A. (2023). *THE IMPACT OF LABOR FORCE ON ECONOMIC GROWTH: A GLOBAL VIEW THE IMPACT OF LABOR FORCE ON ECONOMIC GROWTH: A GLOBAL VIEW* Abigeal Ikeoluwa Eludire. <https://www.researchgate.net/publication/376557034>
- Hadisantoso, E., Arifuddin, A., Wawo, A. B., & Ridwan, Muh. (2023). The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi District/ City. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3712–3720. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1937>
- Hameed Qureshi, M., & Farooq, S. (2020). Assessment of Industrial Cluster Policies in Viet Nam: The Role of Special Economic Zones in Attracting Foreign Direct Investment. In *Perennial Journal of History (PJH: Vol. IV No. I* (Issue 1).
- Hamzah, N., & Nasir, M. (2023). Unveiling the Economic Growth in Gowa Regency: How Original Local Government Revenue and Human Development Index Influence It. *Quantitative Economics and Management Studies (QEMS)*, 4(5). <https://doi.org/10.35877/454RI.qems1952>
- Hidayati, R. A., Salmah, E., & Astuti, E. (2023). Analysis of Labor Force Participation Rate (TPAK) in Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Nusa Tenggara Barat Province, Indonesia. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, 1(3). <https://doi.org/10.59535/sehati.v1i3.166>
- Katarzyna, & Elżbieta. (2023). Special economic zones (SEZs) as an element of sustainable development in emerging countries: a case of Poland. *Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization and Management Series*, 2023(179). <https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.179.13>
- Kurniawan, G. F., & Nihayah, D. M. (2021). Impact of Road Infrastructure and Foreign Direct Investment to Asean Economy Gilang. *Economics Development Analysis Journal*, 10(2), 233–242. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Kusumawati, N. T. I., & Purmiyati, A. (2020). The Influences of Economic and Social Infrastructure on the Economic Growth in Eastern Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, 11(6), 1957–1962. <http://iaeme.com/Home/journal/IJM1957editor@iaeme.com> <http://iaeme.com> <http://iaeme.com/Home/journal/IJM1958> <http://iaeme.com>
- Mahdawi, Notonegoro, K., Rustam, R., Saputra, J., Ilham, R. N., Hutaeruk, R. P. S., Damanik, S. W. H., & Siregar, A. (2021). The effect of local own-source revenue and capital expenditure on economic growth: An empirical evidence from Aceh province, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 149–157. <https://doi.org/10.46254/an11.20210845>
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*.
- Maulidiyah, N. R., & Mohammad, W. (2024). The Influence of the Human Development Index on the Economic Growth of East Java Province in 2022-2023. *Cognitionis Civitatis et Politicae*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/10.55849/politicae.v1i2.1116>

- Mohamed, M. R., Singh, K. S. J., & Liew, C. Y. (2013). Impact of foreign direct investment & domestic investment on economic growth of Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 50(1), 21–35.
- Nadhilla, R. (2023). THE EFFECT OF INFLATION, LABOR FORCE PARTICIPATION RATE AND EXPORTS ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Journal Of Maliksussaleh Public Economics*, 06(02). <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/Jompe>
- Nasyri, I. A., Harsono, I., Yuniarti, T., Sutanto, H., Ayu, I., & Suprapti, P. (2024). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 1(2), 96–109. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1255>
- Paksi, R. P. (2020). Determinants of Economic Growth: Case of Indonesia. *Jdep*, 3(3), 157–171.
- Rokhman, A., Hakim, L., & Sonjaya, T. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PANDEGLANG: POTENSI DAN TANTANGAN. *Seminar Nasional Ilmu Administrasi*.
- Roring, R. O., Djakfar, L., & Wicaksono, A. (2020). The Effect of Special Economic Zone and International Hub Port Development on the Transportation Infrastructure Provision. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 4(9), 2588–2596. <https://doi.org/10.35940/ijitee.d2021.029420>
- Sampurna, F. (2022). *REVIEW REPORT ON THE 2021 VNR OF SDGs ExEcutive Summary*.
- Solow, R. (1956). 1956. A Contribution to The Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics (The MIT Press)*, 70(1), 65–94.
- Song, Y., Deng, R., Liu, R., & Peng, Q. (2020). Effects of special economic zones on fdi in emerging economies: Does institutional quality matter? *Sustainability (Switzerland)*, 12(20), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su12208409>
- Sungsuwan, N., & Sonsuphap, R. (2023). THE SPECIAL ECONOMIC ZONE: A REGULATION OF CROSS-BORDER TRADING IN A DEVELOPING ECONOMY. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 165–172. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art16>
- Suryade, L., Akhmad Fauzi, Noer Azan Achsani, & Eva Anggraini. (2022). Variabel-Variabel Kunci dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan Di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(1), 16–30. <https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.327>
- Tahu, G. P., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., Menes, C. C., & Orbaningsih, D. (2024). THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON ECONOMIC GROWTH WITH CAPITAL EXPENDITURES AS AN INTERVENING VARIABLE. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(6). <https://doi.org/10.24857/RGSA.V18N6-051>
- Tarigan, R. M. (2019). The Role of Incentives in Indonesia Special Economic Zone (Case in Sei Mangkei, North Sumatera Province). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 411–419. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.19>
- Taufiqurrahman, T., & Khoirunurrofik, K. (2023). Special Economic Zones (SEZs) Impact on Poverty in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The*

- Indonesian Journal of Development Planning*, 7(2), 231–249.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v7i2.473>
- Todaro, M. P., & Smith, S. . (2013). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.).
- Wardhana, I. W., Riesfandiari, I., Jamal, E., Hanifah, V. W., Pihri, P., Handoyo, F. W., Purwono, N., Ramadhan, R. P., Setyawan, B., Placek, M., W, B. P. A., Chrysanti, N. D., Daniswara, R. M., Wijanarko, B., & Setiadi, E. (2025). Does a special economic zone impact the surrounding economy? The case study of Kendal, Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1).
<https://doi.org/10.1057/s41599-025-04448-0>
- Wibisono, N., Suprayitno, E., & Asnawi, N. (2024). The Influence of Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Economic Growth and Community Welfare. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 22, Issue 01).
- Wu, M., Liu, C., & Huang, J. (2021). The special economic zones and innovation: Evidence from China. *China Economic Quarterly International*, 1(4), 319–330.
<https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2021.11.004>
- Zhang, Y., & Cheng, L. (2023). The role of transport infrastructure in economic growth: Empirical evidence in the UK. *Transport Policy*, 133(January), 223–233.
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2023.01.017>